



AKUNTANSI PEMERINTAHAN 2020 :

# OPERASI DALAM PENGHENTIAN

Dituturkan oleh Dr Jan Hoesada

## PENDAHULUAN

Disrupsi sosial ekonomi 2020 bila berkepanjangan menyebabkan berbagai tugas pokok dan fungsi K/L dan Pemda tak dapat dilaksanakan, mengandung implikasi akuntansi operasi dalam penghentian untuk beberapa tugas pokok tertentu. Setiap tugas pokok pemerintahan dapat disebut sebuah segmen dalam ilmu akuntansi, karena itu penghentian pengeluaran (*expenditure*) APBN/D tersebut menyebabkan Laporan Segmen atau Tupoksi dihentikan di sajikan dengan angka nihil. Segmen dihentikan tetap dilaporkan dengan angka nihil.

## AKUNTANSI OPERASI DALAM PENGHENTIAN

Dalam pemerintahan, mungkin terdapat sekitar 15 tupoksi penting bagi K/L dan Pemda, dengan satu atau dua tupoksi terpenting bagi setiap K/L, dan sebagian tupoksi tersebut tidak dapat dilakukan tanpa interaksi langsung antara pegawai pemerintah dengan masyarakat sepanjang disrupsi sosial ekonomi global 2020, antara lain layanan kesehatan, pendidikan dan berbagai jenis bantuan sosial. Sebagian layanan terhalang, mungkin masih dapat dilakukan secara maya. Hampiran (*approach*) pemberhentian tupoksi tersebut sebagian bersifat serta merta, atau dikurangi secara bertahap.

Mengambil hikmah PSAK Operasi Dihentikan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan rencana penghentian suatu tupoksi, yaitu jadwal penghentian, hampiran/cara penghentian, apakah sekaligus atau bertahap, masalah legal misalnya pelaksanaan/penghentian perikatan dana bergulir yang sedang berlangsung, dan tatacara menutup satker/suborganisasi pemerintah terkait tupoksi tersebut.

Terdapat sebuah tupoksi utama sebagai misi (maksud pendirian) sebuah kementerian. Terdapat masalah kesinambungan usaha (*going concern*) berisiko munculnya kewajiban (1) pembuatan LK *akhir penghentian operasi utama entitas LK*, (2) audit LK oleh BPK, dan (3) periode akuntansi lanjutan kementerian tersebut tanpa operasi utama tersebut. Penghentian sebuah misi atau tupoksi utama, yang terpenting dan terbesar dari 14 tupoksi sebuah Kementerian, menyebabkan kementerian tersebut kehilangan jati-diri, menjadi sebuah organisasi cangkang (*shell organization*), mungkin menyebabkan reorganisasi kementerian, bahkan peleburan beberapa kementerian atau lembaga negara pada tataran kabinet.

Terdapat jenis operasi atau tupoksi dalam penghentian yang bersifat murni operasional, tanpa perubahan aset, tanpa perubahan satker K/L dan Pemda, tanpa perubahan karyawan. Pada kondisi lain, entitas pelaporan LK seringkali harus menutup suatu fasilitas untuk tupoksi yang dihentikan, mengabaikan sebagian produk yang sedang dibuat, layanan sedang dalam proses, menghapus suatu lini produk/jasa, dan menyesuaikan jumlah tenaga kerjanya dalam menghadapi perubahan tupoksi. Tak terdapat perubahan penyusutan AT, kecuali sarana untuk tupoksi tersebut dijual. Terjadi *retrenchment organisasi operasi dihentikan* untuk mengurangi jumlah karyawan menganggur.



Disrupsi layanan bukan karena bencana namun demi peningkatan efektivitas dan efisiensi, bukan merupakan penghentian operasi layanan pemerintahan dilakukan secara evolusioner/alamiah. Pada umumnya, bila suatu tupoksi atau operasi mandiri dihentikan sesuai perubahan strategis, maka RAPBN/D terkait harus ditelaah ulang dan dihapus.

Karena disrupsi suatu tupoksi terpenting, K/L atau Pemda mungkin harus melakukan strategi banting setir sebagai berikut:

- a. Perubahan sistem tatacara kerja, dari tatap-muka langsung menjadi layanan online
- b. Perubahan sarana kerja, menghapus buku (*write off*) atau alih guna segala sarana layanan lapangan seperti desk/loket layanan, gedung, mobil, dan lain-lain dengan (1) akuntansi penurunan nilai (*impairment of assets*), (2) reklasifikasi aset tersebut dalam pos aset tetap dihentikan penggunaannya dan menunggu penyelesaian dalam rumpun aset lain-lain. AT, ATB, persediaan

yang tiba-tiba tidak berguna karena penghentian suatu tupoksi, dijual, didonasikan atau hapus buku. Nilai pulihan (*Recoverable Amount*) hasil penjualan sebesar tunai (kas) diterima, mungkin lebih kecil atau lebih besar dari nilai buku aset-tak-berguna tersebut, selisih tersebut masuk ke Laporan Operasional dengan judul Keuntungan/Kerugian Pelepasan Aset Tetap Dihentikan Penggunaannya dan Menunggu Penyelesaian setelah memperhitungkan (1) biaya notaris jual-beli aset, (2) biaya pengiriman, dan (3) biaya pesangon PNS pengoperasi set tersebut. Agen pemerintahan tersebut melakukan pemberesan utang pada pemasok aset yang dihentikan penggunaannya, berdampak pada LAK (kas keluar) dan saldo utang (saldo menurun sebesar pembayaran) di Laporan Neraca.

- c. Reorganisasi organisasi cq elektronisasi proses, agar tata kelola tetap efektif dan efisien dalam tata dunia nirtatap muka yang baru.
- d. Perubahan *job description*, PHK dipercepat bagi SDM yang tak mampu bekerja pada lingkungan yang baru, dan perekrutan generasi milenia atau sesudahnya untuk mengisi lowongan tupoksi terelektronisasi.
- e. Suatu tupoksi kementerian mungkin menciptakan utang-piutang kepada negara lain, kepada bisnis dan masyarakat DN dan LN. Penghentian misi-tupoksi khusus tersebut menimbulkan masalah penyelesaian segera utang-piutang, denda wanprestasi, klaim asuransi untuk bencana, harus diresolusi secara hukum. Setiap kementerian perlu segera membuat peraturan menteri terkait segala pemberesan hubungan kontraktual tersebut.

CALK wajib mengungkapkan disruptsi sosial-ekonomi yang menyebabkan (1) perubahan belanja, (2) segmen atau tupoksi yang dihentikan, alasan penghentian, belanja vs anggaran, dan sisa anggaran, (3) AT/ATB/Persediaan/Piutang/Utang dijual/didonasikan/dihapus/alih-buku.

## **PENUTUP**

Penghentian suatu tupoksi utama suatu K/L atau Pemda membutuhkan pengakuntansian secara cermat, walau KSAP belum mengatur secara khusus tentang Laporan Segmen dan Operasi Dihentikan.

Entitas akuntansi pemerintahan mewaspadaai disruptsi bersifat sementara dan jangka pendek, menyebabkan tupoksi dihentikan tersebut segera diaktifkan kembali setelah bencana berlalu.

Diperkirakan, para auditor internal dan eksternal pemerintahan mengubah program audit khusus untuk operasi dihentikan, mungkin berbasis sebuah PMK Akuntansi Operasi Dihentikan.

*Jakarta, 01 Juni 2020.*